

UPDATE HARTA KEKAYAAN 18 KEPALA DAERAH DI SULAWESI TENGGARA, TERKAYA BUKAN GUBERNUR SULTRA ALI MAZI



sultra.tribunnews.com

TRIBUNNEWSULTRA.COM, KENDARI- Update harta kekayaan 18 kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), terkaya bukan Gubernur Sultra Ali Mazi tapi seorang bupati. Harta kekayaan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Provinsi Sultra tersebut dihimpun TribunnewsSultra.com pada Minggu (19/02/2023) dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara di dalam formulir laporan harta yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Berdasarkan data LHKPN KPK update terbaru per 31 Desember 2021 yang dikutip TribunnewsSultra, ternyata kepala daerah terkaya di Provinsi Sulawesi Tenggara bukanlah Gubernur Sultra Ali Mazi. Tetapi dua bupati di Provinsi Sultra yakni Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga disusul Bupati Wakatobi Haliana. Sedangkan, kepala daerah yang memiliki harta paling sedikit adalah Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse. Simak selengkapnya daftar harta kekayaan 18 kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dikutip TribunnewsSultra.com dari laman elhkpn.kpk.go.id:

1. Harta Kekayaan Bupati Konsel, Surunuddin Dangga

Surunuddin yang merupakan Bupati Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki total harta kekayaan mencapai Rp45.505.100.000. Dengan harta miliknya tersebut, Surunuddin Dangga menjadi kepala daerah terkaya di Provinsi Sultra. Harta kekayaan Bupati Konsel, Provinsi Sultra, tersebut dikutip TribunnewsSultra.com dari LHKPN periode 31 Desember 2021. Data harta milik Surunuddin terdiri dari tanah dan bangunan yang mencapai Rp42.056.600.000. Dia tercatat memiliki 49 obyek tanah dan bangunan yang berlokasi di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe. Selain itu, hartanya berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp700 juta dan harta bergerak lainnya sebesar Rp650 juta.

2. Harta Kekayaan Bupati Wakatobi, Haliana

Bupati di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), ini memiliki total harta kekayaan mencapai Rp31.661.884.688. Harta kekayaan milik Haliana yang merupakan Bupati Wakatobi, Provinsi Sultra, terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp21.623.000.000. Tanah dan bangunan miliknya tersebar di 20 lokasi di Kota Kendari, Kabupaten Konawe Utara, Wakatobi, serta Konawe. Dia memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp2.548.000.000 yang tiga di antaranya berupa kapal kayu yang masing-masing senilai Rp445.000.000, Rp645.000.000, dan Rp550.000.000. Haliana berdasarkan LHKPN periode 31 Desember 2021 juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp5.523.000.000 dan surat berharga senilai Rp870.000.000. Selain itu, memiliki kas dan setara kas senilai Rp1.297.884.688 serta hutang sebesar Rp200 juta.

3. Harta Kekayaan Gubernur Sultra, Ali Mazi

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) dua periode tersebut memiliki total harta kekayaan sebesar Rp28.634.743.733. Harta kekayaan Gubernur Sultra Ali Mazi tersebut berdasarkan data LHKPN periode 31 Desember 2021. Kekayaan milik orang nomor satu di Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sultra itu terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak. Untuk harga tak bergerak, Ketua DPW Nasdem Sultra ini memiliki beberapa bidang tanah dan bangunan senilai Rp18,315 miliar. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe, Provinsi Sultra, hingga wilayah Jakarta Selatan. Dia juga tercatat memiliki kendaraan dan mesin total Rp1,935 miliar, serta harga bergerak lainnya senilai Rp2,175 miliar. Salah satu mobil mewahnya yakni Mercedes Benz ML 250 CDI tahun 2013 senilai Rp600 juta.

4. Harta Kekayaan Bupati Kolaka, Ahmad Safei

Bupati Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tersebut memiliki harta kekayaan sebesar Rp26.834.946.625. Harta kekayaan Ahmad Safei yang merupakan Bupati Kolaka dua periode ini dikutip dari data LHKPN periode 31 Desember 2021. Berdasarkan data hartanya, Safei memiliki tanah dan bangunan senilai Rp2.672.870.760. Terdapat 30 tanah dan bangunan miliknya yang tersebar di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sultra. Dia hanya memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp8.000.000 yakni motor Kawasaki Ninja KR 150I tahun 2009. Safei juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp23.622.500.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp531.575.865.

5. Pj Bupati Buteng, Muhammad Yusuf

Yusuf yang saat ini adalah Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), memiliki total harta kekayaan mencapai Rp.11.880.516.087. Jumlah tersebut berdasarkan LHKPN periode 31 Desember 2021 saat dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sultra. Harta milik Muhammad Yusuf yang kini menjabat Pj Bupati Buteng

tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp11 miliar. Tanah dan bangunan miliknya tersebut berada di empat lokasi yang tersebar di Kota Kendari dan Kabupaten Muna, Provinsi Sultra. Yusuf juga memiliki alat transportasi dan mesin Rp850.000.000, kas dan setara kas Rp30.516.087, serta tidak memiliki hutang.

6. Harta Kekayaan Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa

Kery Konggoasa yang merupakan bupati di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), memiliki total harta kekayaan sebesar Rp9.949.096.600. Harta kekayaan Kery Saiful Konggoasa tersebut berdasarkan LHKPN KPK periodik 31 Desember 2021. Bupati Konawe, Provinsi Sultra, dua periode ini tercatat memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan senilai Rp5.010.000.000. Alat transportasi dan mesin Rp964.000.000, harta bergerak lainnya Rp4.625.096.600, dan kas dan setara kas Rp. 350.000.000. Kery juga tercatat memiliki utang sebesar Rp1 miliar.

7. Harta Kekayaan Bupati Muna, LM Rusman Emba

La Ode Muhammad (LM) Ruman Emba yang merupakan bupati di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), memiliki harta kekayaan senilai Rp6.082.122.916. Harta milik Bupati Muna dua periode tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp5.550.000.000. Tanah dan bangunan tersebut dikutip TribunnewsSultra.com dari data LHKPN periodik 31 Desember 2021 tersebar di Kabupaten Muna serta Kota Kendari, Provinsi Sultra. Selain itu, dia juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp420.000.000, harta bergerak lainnya Rp244.250.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp29.321.981.

8. Harta Kekayaan Pj Bupati Kolaka Utara, Parinringi

Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara (Kolaka Utara), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), tersebut memiliki total harta kekayaan senilai Rp3.383.451.056. Kekayaan dalam LHKPN periodik 31 Desember 2021 saat dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Sultra. Dalam laporan tersebut, Parinringi memiliki harta terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp2.830.000.000 yang berada di lima lokasi di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe. Harta kekayaan miliknya juga berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp205.000.000, harta bergerak lainnya Rp38.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp310.451.056.

9. Harta Kekayaan Bupati Buton, Muh Ridwan Zakariah

Bupati Buton Utara (Buton) tersebut memiliki total harga kekayaan senilai Rp3.306.354.414 berdasarkan data LHKPN pada 24 November 2021 lalu. Harta kekayaan milik Muh Ridwan Zakariah tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp1.753.300.000 yang tersebar di 5 lokasi di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Selain itu, harta kekayaannya berupa alat

transportasi dan mesin senilai Rp592.500.000, harta bergerak lainnya sebesar Rp265 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp695.554.414.

10. Pj Bupati Mubar, Bahri

Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), tersebut memiliki total harta kekayaan yang mencapai Rp3.263.663.374. Harta kekayaan Bahri tersebut berdasarkan LHKPN periodik 31 Desember 2021 saat menjabat sebagai Direktur Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Data harta milik Pj Bupati Mubar, Provinsi Sultra, tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp2.969.000.000. Tanah dan bangunan tersebut berada di 8 lokasi di Kota Kuningan, Kota Sumedang, Kota Bandung, Kota Baubau, Kabupaten Konawe Selatan, hingga Kabupaten Buton. Bahri juga memiliki alat transportasi dan mesin Rp428.000.000, harta bergerak lainnya Rp75.000.000, kas dan setara kas Rp99.809.998, serta hutang senilai Rp308.146.624.

11. Harta Kekayaan Bupati Konut, Ruksamin

Bupati Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), ini diketahui memiliki total harta kekayaan sebesar Rp2.671.901.470. Harta kekayaan milik Ruksamin yang merupakan Bupati Konut, Provinsi Sultra, dua periode tersebut berdasarkan LHKPN KPK periode 31 Desember 2021. Kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp2.337.028.960. Tanah dan bangunan miliknya tersebut tersebar di 20 lokasi di Kabupaten Konawe Utara. Ruksamin tercatat hanya memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp180.166.667, harta bergerak lainnya Rp53.400.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp101.305.843.

12. Harta Kekayaan Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu

Asmawa yang kini adalah Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp2.472.800.410. Harta kekayaannya tertuang dalam LHKPN periodik 31 Desember 2021 yang dilaporkannya saat menjabat Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Harta milik Asmawa Tosepu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp2.580.000.000. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di lima lokasi di Kota Depok, Semarang, serta Kota Kendari. Asmawa juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp442.000.000 dan harta bergerak lainnya Rp69.000.000. Pj Wali Kota Kendari, Provinsi Sultra, tersebut juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp16.589.789 serta hutang sebesar Rp634.789.379.

13. Harta Kekayaan Bupati Konkep, Amrullah

Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), tersebut memiliki total harta kekayaan Rp1.812.445.414. Harta kekayaan milik Amrullah tersebut berdasarkan data LHKPN KPK periode 31 Desember 2021. Bupati Konkep tersebut memiliki harta yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp394.380.000 dan

alat transportasi dan mesin sebesar Rp60 juta. Selain itu, harta bergerak lainnya Rp25.000.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp1.333.065.414.

14. Harta Kekayaan Pj Bupati Busel, La Ode Budiman

Budiman yang merupakan Penjabat (Pj) Bupati Buton Selatan (Busel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), tersebut memiliki total kekayaan Rp.1477.024.274. Harta kekayaan berdasarkan LHKPN periode 31 Desember 2021 tersebut dilaporkannya saat dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Busel, Provinsi Sultra. La Ode Budiman tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp1.125.000.000 yang tersebar di empat lokasi di Kota Baubau dan Kabupaten Buton Selatan. Selain itu, alat transportasi dan mesin senilai Rp50.000.000, harta bergerak lainnya sebesar Rp17.500.000, serta kas dan setara kas senilai Rp284.524.274.

15. Harta Kekayaan Pj Bupati Bombana, Burhanuddin

Penjabat (Pj) Bupati di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), tersebut memiliki total harta kekayaan sebesar Rp.1.298.021.617. Harta kekayaan dalam LHKPN tersebut dilaporkan Burhanuddin periode 31 Desember 2021 saat menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra. Data harta kekayaannya tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp1.294.737.000 yang tersebar di 11 lokasi di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Harta kekayaan lainnya berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp160.000.000 dan harta bergerak lainnya Rp3.000.000. Burhanuddin juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp104.642.487 serta hutang sebesar Rp264.357.870.

16. Harta Kekayaan Pj Bupati Buton, Basiran

Penjabat (Pj) Bupati di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), tersebut memiliki harta kekayaan senilai Rp1.171.898.707. Basiran adalah pejabat Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sultra yang saat ini menjadi Pj Bupati Buton. Harta kekayaan dalam LHKPN periode 31 Desember 2021 tersebut dilaporkannya saat menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Sultra. Data harta Basiran terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp650.000.000, harta bergerak lainnya Rp139.700.000, kas dan setara kas sebesar Rp224.855.152, serta hutang Rp46.656.445.

17. Harta Kekayaan Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse

Monianse tercatat memiliki total harga kekayaan Rp555.645.449 berdasarkan LHKPN KPK periode 31 Desember 2021. Harta kekayaan itu dilaporkan La Ode Ahmad Monianse saat masih menjabat Wakil Wali Kota Baubau di Provinsi Sulawesi Tenggara. Data harta kekayaannya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp250.358.000, harta bergerak lainnya Rp114.300.000, serta kas dan setara kas Rp190.987.449. Kini Monianse adalah Wali Kota Baubau definitif menggantikan pejabat sebelumnya AS Thamrin yang berpulang 13 Januari 2022 lalu.

18. Harta Kekayaan Bupati Koltim, Abdul Azis

Azis yang menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur (Koltim), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), belum memiliki data pengumuman LHKPN KPK yang dilansir melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Dia resmi dilantik sebagai Wakil Bupati atau Wabup Koltim pada Rabu (24/08/2022) lalu sekaligus menjadi Pelaksana Tugas atau Plt Bupati Koltim, Provinsi Sultra. Sebelum menjadi kepala daerah, Abdul Azis adalah anggota Polri yang bertugas di Polda Sultra. Dia juga dikenal sebagai anggota Polri yang juga bertugas sebagai ajudan Gubernur Sultra Ali Mazi. Pada Kamis (28/07/2022), Abdul Azis terpilih sebagai Wabup Koltim sisa masa jabatan 2022-2024 dalam pemilihan di DPRD Koltim.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2023/02/20/update-harta-kekayaan-18-kepala-daerah-di-sulawesi-tenggara-terkaya-bukan-gubernur-sultra-ali-mazi?page=all>, Update Harta Kekayaan 18 Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara, Terkaya Bukan Gubernur Sultra Ali Mazi, Senin 20 Februari 2023
2. <https://sultra.tribunnews.com/2023/03/03/daftar-kekayaan-17-kepada-dinas-pemkot-kendari-lhkpn-mencatat-kadis-ini-laporkan-hartanya-rp22-juta>, Daftar Kekayaan 17 Kepala Dinas Pemkot Kendari, LHKPN Mencatat Kadis Ini Laporkan Hartanya Rp22 Juta, Jumat 3 Maret 2023

Catatan:

1. Kewajiban Penyelenggara Negara yang terdiri atas: Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkan harta kekayaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Kewajiban Penyelenggara Negara terkait LHKPN berdasarkan ketentuan tersebut yaitu: bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat; melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.